

**PENGAMAT:**

BINTANG MAHAPUTERA UNTUK PANGlima TNI BISA JADI SINYAL PERGANTIAN

JAKARTA | Harian Merdeka – Penganugerahan Bintang Mahaputera Adipurna kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto pada peringatan HUT ke-81 TNI dinilai dapat menjadi sinyal adanya pergantian pimpinan tertinggi di lingkungan TNI.

(Halaman 11)

NASIONAL

Aktivis Desak KPK
Segera Periksa
Nusron Wahid:
Jangan Tebang Pilih

Halaman 3

PEMERINTAHAN

Peringatan HUT
ke-81 TNI, Presiden
Prabowo Resmikan
Enam Kodam Baru

Halaman 6

SPORT

Indonesia Vs Thailand
di Final FIFA ASEAN,
Adu Taktik Pelatih

Halaman 12

Densus 88 Tangkap 12 Tersangka Terorisme di Enam Provinsi, Diduga Terafiliasi Daulah Islamiyah



JAKARTA | **Harian Merdeka**

Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menangkap 12 tersangka tindak pidana terorisme di enam provinsi di Indonesia sejak Jumat, 2 Oktober 2026.

Penangkapan tersebut dilakukan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Riau, dan Maluku Utara.

Juru Bicara Densus 88 AT Polri Kombes Pol Mayndra Eka Wardhana mengatakan, 12 tersangka yang diamankan masing-masing berinisial HN (43), SM alias NM (52), HA (45), YDKAP (22), Y (36), S (49), A (32), CG (29), J (36), MF (37), AF (26), dan MW (42).

Menurut Mayndra, para tersangka diduga memiliki keterkaitan dengan jaringan yang terafiliasi dengan paham Daulah Islamiyah serta jaringan terorisme lainnya.

“Para tersangka diduga memiliki keterkaitan dengan jaringan yang terafiliasi paham Daulah Islamiyah, juga jaringan terorisme lainnya,” kata Mayndra dalam keterangannya, Minggu (4/10/2026).

Berdasarkan hasil penyidikan sementara, para tersangka diduga memiliki peran yang berbeda-beda dalam jaringan tersebut.

Peran yang diduga dilakukan antara lain konsolidasi jaringan, mengikuti kegiatan pelatihan, menyebarkan propaganda, serta melakukan perekrutan anggota secara langsung maupun melalui media sosial.

Sebagian tersangka juga diduga terlibat dalam pemufakatan tindak pidana terorisme.

● (Agus)

UIN Jakarta Menang Banding, Integrasi TKIP dan SDIP Pamulang Berlanjut

TANGSEL |
Harian Merdeka

Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta memastikan proses integrasi dan alih kelola satuan pendidikan TKIP dan SDIP Pamulang akan dilanjutkan secara bertahap.

Kepastian tersebut menyusul kemenangan UIN Jakarta dalam perkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta serta perkembangan penanganan aduan terkait Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 1543 Tahun 2025 di Ombudsman RI.

PT TUN Jakarta melalui putusan tertanggal 1 Oktober 2026 membatalkan putusan PTUN Jakarta Nomor 9/G/2026/PTUN.JKT dan menyatakan gugatan Yayasan Ketilang Insan Mandiri (KIM) tidak dapat diterima.

Perkara tersebut sebelumnya bermula dari gugatan KIM terhadap KMA Nomor 1543 Tahun 2025 yang pada 16 Juli 2026 dikabulkan oleh PTUN Jakarta.

Atas putusan tersebut, Menteri Agama dan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengajukan banding. Hasilnya, putusan tingkat banding berpihak kepada Menteri Agama dan UIN Jakarta.

Selain putusan PT TUN,



kepastian hukum juga diperkuat dengan perkembangan di Ombudsman RI.

Ombudsman RI memutuskan tidak perlu menindaklanjuti Surat Ketua Ombudsman RI Nomor T/2809/PC.01.01/XI/2025 tertanggal 28 November 2025 yang sebelumnya berisi saran perbaikan terkait KMA Nomor 1543 Tahun 2025.

Menindaklanjuti surat tersebut, Rektor UIN Jakarta sebelumnya telah menyampaikan aduan melalui Surat Nomor B-4235/R/HK.00/06/2026 tertanggal 18 Juni 2026.

“Putusan PT TUN Jakarta dan Ombudsman memberikan kepastian hukum bagi UIN Jakarta untuk melanjutkan pelaksanaan KMA 1543 Tahun 2025,” kata kuasa hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Alwanih, dalam keterangan resmi, Minggu (4/10/2026).

Integrasi Tak Hanya Soal Pengelolaan Sekolah

Alwanih menjelaskan, pelaksanaan integrasi dan

alih kelola tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan sekolah.

Menurut dia, proses tersebut mencakup sejumlah aspek, mulai dari kelemagaan, aset, keuangan, sumber daya manusia (SDM), hingga tata kelola.

Namun demikian, keberlangsungan proses pendidikan menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan integrasi tersebut.

“Yang utama, proses pendidikan tetap berjalan dan kepentingan siswa, orang tua, guru, serta tenaga kependidikan tetap menjadi perhatian,” ujarnya.

Tak hanya itu, UIN Jakarta juga mengimbau seluruh pihak menghormati dan menaati dasar hukum yang telah ditetapkan.

“Kami mengimbau semua pihak menaati dasar hukum tersebut, agar terhindar dari konsekuensi hukum yang serius karena sikap mengabaikan atau bahkan menghalangi,” pungkas Alwanih. ● (Agus)

Redaksi **MERDEKA**

Diterbitkan Oleh : PT.JAKARTA RAYA PERS

Pemimpin Umum : Helmy Halim, Pemimpin Perusahaan : Alan Oskar, Wakil Pemimpin Perusahaan : Verencia Mercy, Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Helmy Halim, Wakil Pemimpin Redaksi : Abdul Rohman, Redaktur Eksekutif : Egi Hendrawan, Redaktur Pelaksana : Agus Irawan, Redaktur : Andri Achdiat, Budi Santoso, Taufik, Saepudin, Adam Kamal, Reporter : Aceng Abidin, Ahmad Baladi, Sahrul, Robi Liu, Prayitno, Edi.ST, Nurziman, Rafiudin, Abdul Aziz, Siti Marko, RA. Sudrajat, Syarif Hidayat, Irwani Heliawan, Abidin, Hasuri, Mukhtar, Jan Zarian, Juli Rabiati, H.Mulyadi, Didit, Daenk, Ali.R., Kabiromo Medan : Umar, S.Pd.I Perwakilan Nias (Sumut) Adi Laoli, Sekretaris Redaksi : Syafina Azzahra, Keuangan : Yosefin Arwinda Devi, Manager Iklan : Muksin, P.Adi, Iklan : S Fajar, Wilki Irawan, Pemasaran : Hendro, Anwar, Saunan, Agus Black, Dian, Layout : Bobby Saputra, Fuad, IT Web : Walid, Amel, Bagian Umum/OB : Wawan, Penasehat Hukum : Hanafi Tanawijaya, SH, Dedi Suryadi. SH

Kantor Usaha/Redaksi : Rukan Golden Fatmawati, Jl.RS Fatmawati G-34 No.15 RT.008 RW.006, Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. NO. REK. BANK MANDIRI KCP JAKARTA KEMENDIKBUD 1220011807917 a/n JAKARTA RAYA PERS.Telp: 081212262686

Kantor Perwakilan : Ruko ModernLand Blok R 30, Jalan Hartono Raya Kelurahan Kelapa Indah Kecamatan Tangerang Kota Tangerang Telepon : (021) 59728637. (isi di luar tanggungjawab percetakan)

Aktivist Desak KPK Segera Periksa Nusron Wahid: Jangan Tebang Pilih

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memeriksa Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid terkait kasus dugaan suap di lingkungan kementerian yang dipimpinnya.

Desakan tersebut disampaikan Ketua Umum Barisan Rakyat Nusantara (BaraNusa) Adi Kurniawan menyusul langkah KPK yang kini mendalami alur perintah dan aliran uang dalam perkara tersebut.

Menurut Adi, pemeriksaan terhadap Nusron tidak seharusnya ditunda terlalu lama. Terlebih, KPK telah menyebut adanya empat tersangka yang diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN tersebut.

"Jangan sampai publik melihat KPK seperti lambat dan ragu-ragu ketika kasusnya sudah terang.

KPK harus segera memeriksa Nusron Wahid agar semuanya menjadi jelas dan terang benderang," kata Adi dalam keterangannya, Minggu (4/10).

Adi menilai, posisi Nusron sebagai pimpinan kementerian yang menjadi lokasi perkara membuat keterangannya penting bagi penyidik. Apalagi, KPK sendiri tengah mendalami dugaan alur perintah yang berkaitan dengan para tersangka yang disebut sebagai orang kepercayaan Nusron.

"Kalau memang tidak terlibat, pemeriksaan justru penting untuk menjelaskan kepada publik. Sebaliknya, kalau ada keterlibatan, jangan sampai siapa pun kebal hukum hanya karena memiliki jabatan," tegasnya.

KPK sebelumnya menetapkan delapan tersangka dalam perkara dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor. Empat di antaranya, yakni Arif Sugiyanto,



Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, Erwin, dan Muhammad Fakhry, disebut KPK sebagai pihak yang diduga merupakan orang kepercayaan Nusron Wahid.

KPK juga mendalami setoran Rp10 miliar kepada Arif Sugiyanto pada 7 September 2026. Penyidik menyatakan masih menelusuri dari mana sumber uang tersebut dan kaitannya dengan perkara.

Bagi Adi, rangkaian fakta tersebut semestinya menjadi alasan bagi KPK untuk mempercepat proses pemeriksaan, bukan justru membuat publik menunggu tanpa kepastian.

"KPK jangan pengecut. Jangan tebang pilih dalam menegakkan

hukum. Kalau memang pemberantasan korupsi menjadi komitmen, siapa pun yang berkaitan dengan perkara harus diperiksa secara profesional, termasuk pejabat tinggi negara," ujarnya.

Adi juga mengingatkan Presiden Prabowo Subianto yang pernah menyampaikan komitmen untuk mengejar para koruptor hingga "Antartika".

"Ucapan Presiden Prabowo bahwa koruptor akan dikejar sampai ke Antartika sekarang harus diuji dan dibuktikan. Jangan sampai publik menganggap itu hanya omon-omon. Rakyat menunggu bukti bahwa pemberantasan korupsi benar-benar berlaku untuk semua," katanya. ● (Egi)

Ahmad Doli Turun Tangan ke Pemalang Usai Siswa SD Meninggal Akibat Perundungan

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Dugaan perundungan yang menewaskan siswa kelas II SDN 1 Kebondalem, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Muhammad Hasbi Al Aqib (7), kembali membuka luka lama kasus kekerasan anak di Indonesia.

Korban diduga dipalak dan dipukuli kakak kelasnya hingga meninggal dunia pada Rabu (30/9/2026). Jenazah kemudian diautopsi tim Bidokkes Polda Jateng di RSUD M Azhari Pemalang.

Kasat Reskrim Polres Pemalang, AKP M Wildan Umar, menyatakan pihaknya telah menerima laporan masyarakat dan langsung melakukan peny-



elidikan.

"Kami sedang melaksanakan autopsi untuk mengetahui penyebab kematian korban. Proses ini dibantu tim forensik Biddokkes Polda Jateng secara scientific crime investigation," ujarnya, dikutip Minggu (4/10/2026).

Ibu korban, Diah Indriyanti (36), mengungkapkan anaknya sempat dirawat di rumah sakit

selama sembilan hari.

"Pulih sebentar, lalu sakit lagi. Kemarin berniat dibawa ke rumah sakit, tapi sudah meninggal," katanya kepada wartawan.

Sorotan Ahmad Doli

Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menegam keras peristiwa ini.

"Sekali lagi kita melihat kekerasan yang dialami anak-anak, bahkan kali ini sampai merenggut nyawa. Saya bermacam keras kejadian ini," tulisnya di akun Instagram, Minggu (4/10/2026).

Doli menegaskan, kasus Pemalang menunjukkan fungsi pendidikan dan perlindungan anak belum berjalan optimal.

Ia berencana mendatangi Pemalang untuk bertemu pihak sekolah, aparat, dan masyarakat.

"Anak-anak adalah wajah masa depan bangsa. Kalau wajah anak-anak ini rusak dan kita biarkan, maka sama saja kita merusak masa depan bangsa," ujarnya.

Ahmad Doli menegaskan bahwa kasus Pemalang harus menjadi momentum memperkuat kolaborasi sekolah, aparat, masyarakat, dan negara.

"Kita semua harus menghentikan kekerasan anak segera. Saya mohon doa agar langkah ini bisa mencegah kasus serupa di masa mendatang," pungkasnya. ● (Egi)



Kunjungan ke Minahasa, Pangdam XIII/Merdeka Sambangi SMA Taruna Nusantara

MINAHASA | **Harian Merdeka**

Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Mirza Agus SIP mengunjungi SMA Taruna Nusantara yang berada di wilayah Langowan Barat, Kabupaten Minahasa, Sulut pada, Jumat (2/10/2026).

Kedatangan Pangdam XIII/Merdeka bersama rombongan disambut oleh staf pengajar SMA Taruna Nusantara. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari agenda Pangdam XIII/Merdeka dalam melihat secara langsung lingkungan pendidikan serta pembinaan generasi muda, khususnya di lingkungan sekolah yang memiliki orientasi terhadap pembentukan karakter, kedisiplinan, dan kepemimpinan.

Pangdam XIII/Merdeka berkesempatan melihat secara langsung kondisi lingkungan sekolah dan berinteraksi dengan jajaran staf pengajar. Kehadiran Pangdam juga menjadi momentum untuk mempererat komunikasi serta membangun sinergi antara TNI AD dengan lembaga pendidikan dalam mendukung pembentukan generasi muda yang berkarakter dan memiliki semangat pengabdian kepada bangsa dan negara.

"Pendidikan tidak hanya membentuk generasi yang cerdas secara akademik, tetapi juga harus membangun karakter, kedisiplinan, tanggung jawab, serta jiwa kepemimpinan. Nilai-nilai tersebut sangat penting sebagai bekal generasi muda dalam menghadapi tantangan bangsa ke depan," ujar Pangdam XIII/Merdeka.

Menurut Pangdam, keberadaan lembaga pendidikan seperti SMA Taruna Nusantara memiliki peran penting dalam menyiapkan generasi muda yang memiliki wawasan kebangsaan, integritas, dan semangat pengabdian.

"Saya berharap para siswa dapat memanfaatkan kesempatan pendidikan dengan sebaik-baiknya, terus belajar, menjaga disiplin, dan menanamkan semangat untuk memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara," ujarnya.

Dalam kunjungan itu, Pangdam XIII/Merdeka didampingi Asintel Kasdam XIII/Merdeka Kolonel Kav Ilham Faisal Siregar, Asops Kasdam XIII/Merdeka Kolonel Inf Endik Hendra Sandi, Aslog Kasdam XIII/Merdeka Kolonel Kav Yudha Setiawan, dan Aster Kasdam XIII/Merdeka Kolonel Inf Daniel E. S. Lalawi. ● (Egi)

Soroti Denda Rp8,1 T, CERI Desak Transparansi PT Bintang Delapan Mineral

JAKARTA |
Harian Merdeka

PT Bintang Delapan Mineral menjadi salah satu perusahaan tambang nikel yang mendapat sorotan serius dalam daftar potensi sanksi administratif terkait aktivitas pertambangan di kawasan hutan. Nilainya tidak kecil: sekitar Rp8,10 triliun untuk kawasan hutan seluas 831,82 hektare.

Angka tersebut menempatkan PT Bintang Delapan Mineral di posisi kedua dalam daftar 50 perusahaan tambang nikel yang tercatat memiliki potensi sanksi administratif.

Di atasnya terdapat PT Aneka Tambang Tbk (Antam) dengan potensi sanksi sekitar Rp12,65 triliun untuk luasan 1.364,13 hektare.

Data tersebut diperoleh Center of Energy and Resources Indonesia (CERI). Besarnya nilai yang dikaitkan dengan PT Bintang Delapan Mineral membuat perusahaan tersebut menjadi salah satu nama yang paling menonjol dalam daftar potensi sanksi yang kini menjadi perhatian publik.

Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman, menilai angka Rp8,10 triliun tidak boleh sekadar menjadi angka dalam tabel. Menurutnya, pemerintah harus membuka secara terang bagaimana angka tersebut dihitung, bagaimana status hukumnya, serta sejauh mana proses penetapan dan penagihannya telah berjalan.

"PT Bintang Delapan Mineral berada di posisi kedua dengan potensi sanksi sekitar Rp8,10



triliun untuk kawasan hutan seluas 831,82 hektare. Ini angka yang sangat besar. Karena itu, publik berhak mengetahui status sebenarnya, bukan hanya melihat angka potensi dalam sebuah daftar," kata Yusri, Sabtu (3/10/2026).

Yusri menegaskan, persoalan yang perlu dikawal bukan semata-mata besarnya nominal, melainkan kejelasan proses dari hasil penghitungan hingga menjadi kewajiban yang memiliki kekuatan hukum dan dapat ditagih.

"Kalau masih potensi, pemerintah harus menjelaskan dasar dan tahapan verifikasi. Kalau sudah ditetapkan, buka keputusan penetapannya. Kalau sudah ditagih, berapa yang sudah dibayar? Kalau sudah dibayar, berapa yang benar-benar masuk ke kas negara?" tegasnya.

Secara keseluruhan, berdasarkan data yang diperoleh CERI, potensi sanksi administratif terhadap 50 perusahaan tambang nikel mencapai Rp80.197.240.564.135,50 atau sekitar Rp80,19 triliun. Total luasan kawasan yang tercatat mencapai

8.447,28 hektare.

Dalam daftar tersebut, PT Antam berada di posisi pertama dengan potensi sanksi sekitar Rp12,65 triliun untuk 1.364,13 hektare.

Kemudian PT Bintang Delapan Mineral berada di urutan kedua dengan potensi sanksi sekitar Rp8,10 triliun untuk 831,82 hektare.

Setelah itu terdapat PT Arga Morini Indah dengan potensi sanksi sekitar Rp6,92 triliun untuk 710,82 hektare; PT Weda Bay Nickel sekitar Rp4,32 triliun untuk 444,42 hektare; PT Bakti Bumi Sulawesi sekitar Rp3,38 triliun untuk 347,53 hektare; dan PT Sarana Mineralindo Perkasa sekitar Rp2,71 triliun untuk 278,24 hektare.

Selanjutnya, PT Suria Lintas Gemilang tercatat memiliki potensi sanksi sekitar Rp2,48 triliun untuk 255,03 hektare; PT Cahaya Ginda Ganda sekitar Rp2,29 triliun untuk 235,48 hektare; PT Halmahera Sukses Mineral sekitar Rp2,27 triliun untuk 234,04 hektare; serta PT Tonia Mitra Sejahtera sekitar Rp2,19 triliun untuk 224,96 hektare. ● (Egi)

Kadin Desak Sarmuji Selektif Bendung Impor, Industri Lokal Jangan Jadi Korban

JAKARTA |
Harian Merdeka

Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji menghadapi tantangan besar untuk memperkuat industri nasional di tengah derasnya arus produk impor.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pemerintah tidak asal menerapkan pembatasan impor.

Kebijakan perlindungan industri dinilai harus dilakukan secara selektif, terukur, dan berbasis data agar tidak mengganggu kebutuhan industri terhadap bahan baku dan barang modal dari luar negeri.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perindustrian Saleh Husin mengatakan, prioritas perlindungan harus diberikan kepada sektor yang industri dalam negerinya sudah

mampu memproduksi barang dengan kualitas dan kuantitas yang memadai.

“Perlindungan industri dalam negeri perlu diperkuat, tetapi harus terukur, selektif, dan berbasis data. Fokus perlindungan sebaiknya diberikan pada produk yang sudah mampu diproduksi dan dipasok industri dalam negeri, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas,” ujar Saleh dalam keterangannya, Senin (5/10/2026).

Menurut Saleh, masuknya produk impor ke pasar yang sebenarnya sudah mampu dipenuhi produsen lokal berpotensi menekan industri nasional.

Kondisi tersebut dikawatirkan menciptakan persaingan yang tidak sehat sekaligus menghambat ekspansi pelaku industri dalam negeri. Namun, Kadin meng-



ingatkan tidak semua produk impor dapat dibendung. Sejumlah sektor manufaktur masih membutuhkan bahan baku maupun barang modal dari luar negeri karena kapasitas produksi domestik belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan.

Karena itu, kebijakan impor harus memperhitungkan karakteristik masing-masing sektor. “Produk impor dapat menjadi tekanan bagi industri nasional apabila masuk pada produk yang sebenarnya sudah dapat dipasok oleh industri dalam negeri,” kata Saleh.

“Jangan Sekadar Tutup Keran Impor

Kadin menilai perlindungan industri nasional tidak cukup hanya dengan membatasi masuknya barang impor,” jelasnya.

Pemerintah juga harus memastikan industri domestik memiliki kapasitas produksi yang cukup sehingga mampu

mengambil alih kebutuhan pasar.

Dengan kata lain, pembatasan impor harus dibarengi dengan strategi memperkuat industri dari hulu hingga hilir.

Saleh juga menyoroti pentingnya menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Kemudahan perizinan, kepastian berusaha, serta dukungan terhadap peningkatan kapasitas produksi dinilai menjadi faktor penting agar investor semakin tertarik membangun industri di dalam negeri.

“Yang paling mendesak adalah membangun kebijakan perlindungan yang terintegrasi dan berbasis kebutuhan industri,” tegasnya.

Kadin menyebut pemerintah memiliki sejumlah instrumen untuk memperkuat daya tahan industri nasional, mulai dari pengendalian impor, peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), safeguard, hing-

ga pemberian insentif.

Namun, instrumen tersebut tidak bisa diterapkan secara seragam.

“Instrumennya dapat berupa pengendalian impor, peningkatan TKDN, safeguard, maupun insentif, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan karakteristik produk,” ujar Saleh.

Kebijakan yang tepat diharapkan tidak berhenti pada upaya membendung produk impor. Lebih jauh, kebijakan tersebut harus mampu mendorong peningkatan produksi lokal, mengurangi ketergantungan terhadap pasokan luar negeri, sekaligus membuka ruang investasi baru.

Di tengah tantangan tersebut, Menperin Sarmuji dituntut mampu merumuskan kebijakan industri yang tidak hanya protektif, tetapi juga mendorong industri nasional naik kelas dan semakin kompetitif di pasar global. **(Agus)**

KEHILANGAN

TELAH KEHILANGAN Surat AKTA HIBAH Nomor : 1409/2020 berdasarkan surat putusan kepala kantor badan pertanahan Nomor : 178/SK-36.10/IX/2019 a/n Ahmad Bustomi

TELAH KEHILANGAN Surat AKTA HIBAH Nomor : 1404/2020 berdasarkan surat putusan kepala kantor badan pertanahan Nomor : 178/SK-36.10/IX/2019 a/n Ahmad Syarkowi

Program 1001 Pasar Rakyat, Cak Imin Ingin UMKM Naik Kelas Lewat Hunian



BEKASI | **Harian Merdeka**

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar, mendorong kawasan perumahan tidak hanya menjadi tempat tinggal. Kawasan hunian harus dikembangkan menjadi ekosistem ekonomi yang membuka ruang bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, ekonomi kreatif, serta masyarakat untuk tumbuh bersama.

Menurut Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, kawasan perumahan memiliki potensi ekonomi besar karena dihuni komunitas dengan aktivitas warga, fasilitas publik, dan ruang yang dapat mempertemukan pelaku usaha dengan konsumen.

Gagasan tersebut disampaikan Muhaimin saat menghadiri kegiatan 1001 Pasar Rakyat di Perumahan Vida, Bekasi, Jawa Barat, Minggu (4/10/2026).

Muhaimin menilai fasilitas publik dan ruang strategis di kawasan hunian perlu dimanfaatkan secara produktif agar menjadi penggerak ekonomi masyarakat.

"1001 Pasar Rakyat itu ya seperti ini, bagaimana agar fasilitas publik atau fasilitas perumahan atau fasilitas pemerintah pusat, pemerintah daerah dioptimalkan dayanya terutama di posisi-posisi strategis untuk menggerakkan dan menumbuhkan ekonomi," ujar Menko PM.

Dia menjelaskan, program 1001 Pasar Rakyat bukan sekadar menghadirkan tempat transaksi atau kegiatan temporer. Pasar tersebut diharapkan menjadi titik temu rutin antara UMKM dan konsumen sehingga berkembang menjadi ekosistem usaha di dalam kawasan.

Menurut Menteri yang akrab disapa Cak Imin itu, pengalaman Perumahan Vida menunjukkan aktivitas ekonomi dapat berkembang ketika ruang, pelaku usaha, pengelola kawasan, koperasi, dan masyarakat terhubung dalam satu ekosistem. Saat ini, kawasan tersebut melibatkan sekitar 450 tenant dan 200 kantor, sedangkan jumlah pengunjung pasar mencapai sekitar 10.000 orang setiap pekan. ● (Egi)



Peringatan HUT ke-81 TNI, Presiden Prabowo Resmikan Enam Kodam Baru

JAKARTA |
Harian Merdeka

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan memimpin upacara peringatan HUT ke-81 TNI di Lapangan PRIMA Mabes TNI, Jakarta, Senin (5/10/2026). Dalam momentum tersebut, Prabowo akan meresmikan sejumlah satuan baru di lingkungan TNI.

Melansir Antara, Senin (5/10/2026), agenda utama dalam upacara tersebut di antaranya adalah peresmian enam komando daerah militer (Kodam) baru sekaligus pengangkatan enam Panglima Kodam.

Selain itu, Prabowo akan meresmikan 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan (Brigif TP), 150 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP), serta tiga Batalyon Bantuan Tempur (Yon Banpur).

Penguatan struktur

satuan juga dilakukan di lingkungan TNI Angkatan Laut (AL) dan TNI Angkatan Udara (AU).

Di lingkungan TNI AL, akan diresmikan satu Brigade Infanteri Marinir serta empat batalyon Marinir. Sementara itu, di TNI AU, Prabowo akan meresmikan satu Divisi II Pasukan Gerak Cepat (Pasgat), satu Brigade Pasgat, tiga batalyon Pasgat, satu skuadron pendidikan, dua skuadron udara, dan dua satuan radar.

Upacara peringatan HUT ke-81 TNI dijadwalkan berlangsung sekitar pukul 09.00 WIB. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III Letjen TNI Lucky Avianto bertindak sebagai komandan upacara.

Rangkaian upacara diawali dengan laporan komandan upacara kepada Presiden Prabowo.

Selanjutnya, Prabowo akan melakukan pemeriksaan pasukan dengan menaiki kendaraan taktilis Maung produksi PT Pindad.

Setelah pemeriksaan pasukan, Prabowo dijadwalkan menyampaikan amanat dalam upacara HUT ke-81 TNI.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga akan memberikan penghargaan kepada sejumlah satuan dan personel TNI.

Setelah upacara selesai, Prabowo dijadwalkan menyaksikan defile pasukan serta parade alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI.

Parade tersebut akan menampilkan sejumlah alutsista TNI, khususnya persenjataan dan peralatan militer baru.

Peresmian enam Kodam dan ratusan satuan baru tersebut menjadi salah satu agenda utama dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI tahun ini. ● (Egi)

Kantor Imigrasi Tangerang Tangkap 13 WN China yang Bekerja Jadi Buruh

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang mengamankan 13 warga negara (WN) China yang diduga menyalahgunakan izin tinggal. Belasan WN China itu berkegiatan sebagai kuli bangunan atau pekerja kasar dengan menggunakan izin tinggal kunjungan.

Mereka diamankan dalam kegiatan Operasi Gabungan Tim Pengawasan Orang Asing (TIM-PORA) Kabupaten Tangerang, Rabu (30/9/2026). Mereka ditangkap di sebuah proyek konstruksi yang berada di wilayah Kabupaten Tangerang.

“Hasil pulbaket intelijen kami, serta informasi dari anggota TIMPORA dan masyarakat setempat, kami memperoleh informasi bahwa pada target lokasi yang kami sasar tersebut diketahui banyak keberadaan dan kegiatan dari WNA,” kata Kepala Kantor Wilayah Ditjenim Banten. Barron Ichsan dalam keterangannya, Sabtu (3/10/2026).

“Kantor Imigrasi Tangerang berserta dengan Anggota TIMPORA bergerak bersama ke Lokasi yang menyasar sebuah Proyek Konstruksi yang berada di sebuah Kawasan pergudangan di Kawasan Legok Kabupaten Tangerang untuk melaksanakan pengawasan keimigrasian serta pengecekan izin lainnya sesuai dengan tusi dari masing-masing anggota TIMPORA” lanjutnya.

Petugas kemudian melakukan pemeriksaan terhadap 25 WN China yang berkegiatan di lokasi proyek tersebut. Sebanyak 12 WNA pemegang ITAS sudah berkegiatan sesuai dengan izin tinggal yang diberikan.

Petugas menemukan 13 WN China tersebut sedang berkegiatan sebagai kuli bangunan atau pekerja kasar dengan menggunakan izin tinggal kunjungan. Diduga terdapat pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh 13 WN China tersebut.

“Setelah kita lakukan pendataan dan pemeriksaan keimigrasian serta pengecekan ter-

hadap dokumen yang dimiliki, petugas menemukan adanya dugaan pelanggaran keimigrasian terhadap 13 WNA yang seluruhnya berkewarganegaraan RRT sehingga petugas mengamankan ke-13 WN RRT tersebut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” ujarnya.

Belasan WN China itu kemudian dimintai keterangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, mereka berkegiatan tidak

sesuai dengan izin tinggal yang diperoleh.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan, 13 WN RRT tersebut menggunakan Izin Tinggal C20 yang dikhususkan untuk kegiatan pemasangan atau instalasi mesin, namun pada faktanya 13 WN RRT tersebut bekerja sebagai buruh konstruksi pada proyek tersebut serta berkegiatan tidak sesuai dengan penjaminnya,” jelasnya.

● (Egi)



Kasus Koba Tin, Kejati Babel Tahan Dua Pegawai Bank Terkait Dana Rp111 Miliar



PANGKAL PINANG |
Harian Merdeka

Kejaksanaan Tinggi (Kejati) Bangka Belitung resmi menahan dua pegawai bank pelat merah berinisial MR dan EDY terkait dugaan pengurusan dana jaminan pascatambang PT Koba Tin senilai Rp 111 miliar. Dana yang seharusnya digunakan untuk reklamasi lahan bekas tambang justru dicairkan ke kurator dan dijadikan harta pailit.

Penetapan tersangka dilakukan pada Rabu, 1 Oktober 2026. MR diketahui menjabat sebagai Penyelia Customer Service, sementara EDY sebagai Wakil Kepala Cabang atau Pimpinan Bidang Pelayanan.

Modus Cairkan ke Kurator Aspidus Kejati Babel, Corneles Geeb Paulus Heydemas, mengungkapkan modus yang dilakukan kedua tersangka. Dana jaminan pascatambang milik PT Koba Tin yang berada di bawah

penguasaan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) dicairkan dan dimasukkan sebagai boedel pailit.

“Dana jaminan pascatambang bukan merupakan aset PT Koba Tin sehingga tidak dapat dijadikan boedel atau harta pailit. Dana tersebut seharusnya digunakan Ditjen Minerba untuk kegiatan reklamasi dan pemberdayaan masyarakat,” tegas Corneles.

Akibat perbuatan tersebut, negara dirugikan sekitar USD 6,2 juta atau setara Rp 111 miliar.

Reklamasi Hanya 52 Persen Dampak paling nyata adalah kegiatan reklamasi pascatambang yang tidak tuntas. Dari target yang ditetapkan, reklamasi baru tercapai sekitar 52,12 persen. Hal ini berpotensi merusak ekosistem di sekitar

bekas tambang dan menghambat program pemberdayaan masyarakat lingkaran tambang.

Jeratan Hukum

Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 603 UU No. 1 Tahun 2023 juncto Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 20 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Serta Pasal 604 UU No. 1 Tahun 2023 sebagai dakwaan subsidiar.

Potensi Tersangka Baru

Kejati Babel menyebut penyidikan masih terus dikembangkan. Hingga kini, lebih dari 20 saksi telah diperiksa dan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka tambahan, termasuk dari pihak kurator yang turut terlibat dalam pencairan dana tersebut.

● (Egi)

JENNIFER COPPEN DUKUNG SUAMI, YAKIN TIMNAS JUARA

JAKARTA | Harian Merdeka – Aktris Jennifer Coppen ikut merasakan ketegangan menjelang laga final yang mempertemukan Timnas Indonesia dengan Thailand, Senin (5/10/2026).

Dukungan Jennifer semakin besar karena sang suami, Justin Hubner, menjadi salah satu pemain yang akan memperkuat skuad Garuda pada pertandingan tersebut.

Jennifer mengatakan Justin bersama seluruh pemain Timnas Indonesia tengah menjalani persiapan serius untuk menghadapi

laga penentuan. Ia berharap suaminya dapat memberikan kemampuan terbaik demi membawa Indonesia meraih hasil maksimal.

“Pastinya tiap hari mereka lagi training sekarang. Papa Jusa mempersiapkan yang terbaik dan akan mengeluarkan semua kemampuan dia untuk membela Timnas. Dan bukan

Papa Jusa doang, tapi semua pemain Timnas juga they gonna do their best pastinya,” kata Jennifer Coppen di Kelapa Gading, Sabtu (3/10/2026).

Menurut Jennifer, persiapan yang dilakukan para pemain menjadi modal

penting sebelum menghadapi Thailand. Ia pun memberikan dukungan penuh kepada Justin dan seluruh anggota skuad Garuda yang akan berjuang di partai final.

Pertandingan Indonesia kontra Thailand menjadi laga yang dinantikan para pendukung sepak bola Tanah Air. Kehadiran Justin Hubner di lini pertahanan diharapkan turut memperkuat Timnas Indonesia dalam upaya meraih gelar juara. ● (hmi/dth)





Mutasi di Polda Metro Jaya: Kombes Bismo Teguh Prakoso Jabat Dirresnarkoba

JAKARTA |
Harian Merdeka

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menggebrak di hari pertamanya menjabat Kapolri dengan memutasi dan merotasi puluhan Pati dan Pamen. Mutasi itu juga dilakukan di jajaran Direktorat Polda Metro Jaya.

Ada tiga posisi direktur di Polda Metro Jaya berganti wajah. Wajah-wajah lama akan berganti sosok baru untuk mengisi Direktorat di Polda Metro Jaya. Rotasi yang diteken dalam Surat Telegram Kapolri nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026 itu juga mengganti posisi Kapolda Metro Jaya. Mutasi yang dilakukan Jenderal Suyudi mencakup sejumlah jabatan strategis di tingkat Mabes Polri hingga kewilayahan.

Khusus di Polda Metro Jaya, posisi Kapolda men-

galami perubahan yang sebelumnya diemban oleh Komjen Pol Asep Edi Suheri itu kini diisi Irjen Pol Dadang Hartanto. Irjen Dadang sebelumnya menjabat Kapolda Maluku akan mengemban amanah di wilayah hukum yang mencakup Jabodetabek ini.

Selain Kapolda, Wakapolda Metro juga berganti. Sebelumnya posisi tersebut diisi oleh Irjen Pol Dekananto Eko Purwono, kini dijabat oleh Brigjen Pol Adex Yudiswan. Irjen Dekananto akan menjabat sebagai Kapolda Jawa Timur. Tiga jabatan direktur di Polda Metro Jaya juga dirotasi. Salah satunya posisi Direktur Reserse Siber yang kini dijabat Kombes Pol Fian Yunus. Kombes Fian sebelumnya menjabat Direktur Reserse Siber Polda Jawa Barat.

Untuk posisi Direktur Reserse Kriminal Umum

Polda Metro Jaya, posisi yang sebelumnya ditempati oleh Kombes Pol Iman Imanuddin itu kini dijabat Kombes Pol Imron Ermawan. Kombes Pol Imron sebelumnya ditugaskan pada BNN Polri.

Sementara itu, Kombes Pol Iman Imanuddin kini diangkat dalam jabatan baru sebagai Kabidbingadik Sespim Lemdiklat Polri. Iman Imanuddin diketahui telah 1,5 tahun mengisi jabatan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.

Untuk bidang pemberantasan narkoba, Dirresnarkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol. Ahmad David dimutasi menjadi Dosen Kepolisian Utama Tk. II Akpol Lemdiklat Polri. Jabatan Dirresnarkoba Polda Metro Jaya selanjutnya diisi Kombes Pol. Bismo Teguh Prakoso yang sebelumnya menjabat Dirreskrimsus Polda Jawa Barat. ● (Egi)

Mengenal Irjen Pol Hengki, Jenderal Spesialis Reserse yang Resmi Pimpin Polda Jabar



JAKARTA | **Harian Merdeka**

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kembali melakukan penyegaran organisasi melalui mutasi sejumlah perwira tingginya. Salah satu nama yang mendapat amanat strategis adalah Irjen Pol Hengki, S.I.K., M.H., yang resmi mengemban jabatan baru sebagai Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Barat.

Dikenal luas sebagai perwira tinggi yang sarat pengalaman di bidang reserse, rekam jejak kepemimpinannya Irjen Pol Hengki di tubuh Polri terbentang panjang dari tingkat polsek, polres, polda, hingga mabes polri. Berikut adalah profil dan perjalanan karier lengkap jenderal bintang dua kelahiran Lampung ini.

Profil Singkat dan Latar Belakang Pendidikan

Irjen Pol Hengki lahir di Pulau Batu, Negeri Agung, Way Kanan, Lampung, pada 7 Januari 1971. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akp) tahun 1995 yang memulai pengabdian di Korps Bhayangkara sejak usia muda.

Untuk menunjang profesionalisme dalam menjalankan tugas kepolisian, ia secara konsisten mengikuti berbagai jenjang pendidikan pengembangan kepolisian, di antaranya: Akademi Kepolisian (Akp) – Lulus 1995 Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Lulus 2004

Sekolah Staf dan Pimpinan (SESPIM) Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (SESPIM-TI) – Lulus 2021

Rekam Jejak Karier: Meniti Dari Bawah hingga Jajaran Pucuk Pimpinan Wilayah

Karier militer/kepolisian Irjen Pol Hengki diwarnai dengan penugasan di berbagai fungsi operasional, dengan fokus utama pada bidang reserse dan penegakan hukum. Sebelum dipercaya memimpin Polda Jawa Barat, ia telah malang melintang menempati sejumlah posisi penting di berbagai daerah di Indonesia. ● (Egi)



Pemkab Serang Turunkan Satgas Cek Galian C di Pabuaran dan Ciomas

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Tim Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan dan Pemantauan Pertambangan Kabupaten Serang meninjau aktivitas tambang atau galian C di Kecamatan Pabuaran dan Ciomas. Peninjauan sebagai tindak lanjut adanya pengaduan berkenaan dengan aktivitas penambangan yang ada di dua kecamatan tersebut.

"Hari ini Tim Satgas Pemantauan Pertambangan Kabupaten Serang melakukan pemantauan dan pengecekan langsung kegiatan pertambangan di wilayah Kecamatan Pabuaran," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Serang Sarudin di lokasi galian C tepatnya Kampung Ranca Belut, Desa Pancanegara, Kecamatan Pabuaran pada Jumat, 2 Oktober 2026.

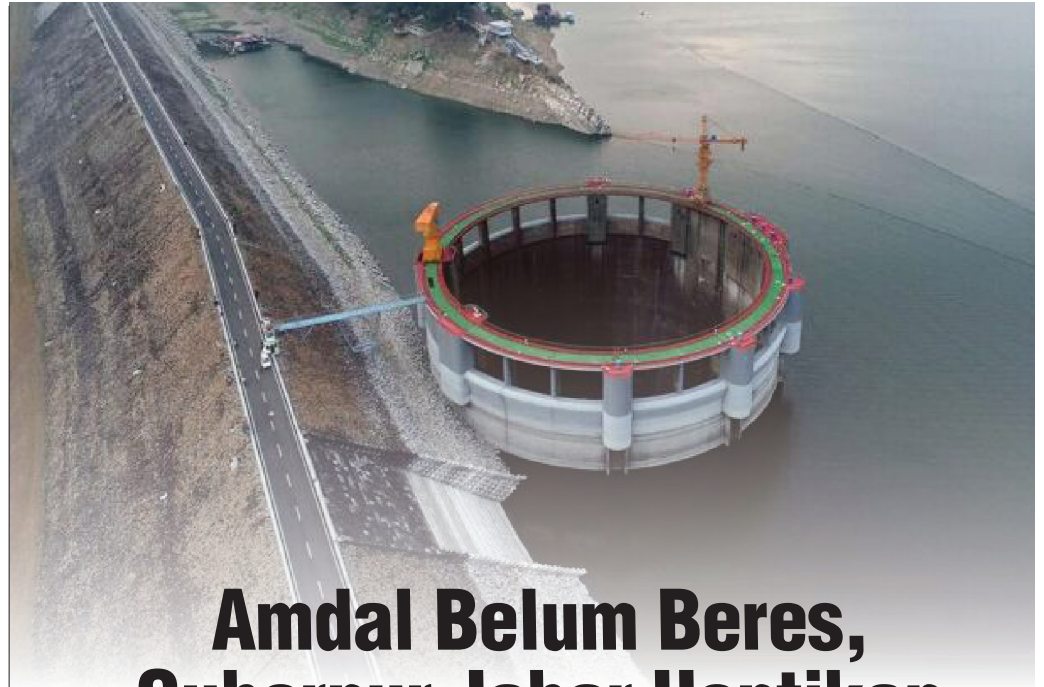
Ditegaskan Sarudin, pada pemantauan dan pengecekan galian C baik di Kecamatan Pabuaran dan Ciomas untuk melakukan pemeriksaan terhadap aktivitas pertambangan tersebut. "Pemeriksaan difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu legalitas dan kesesuaian perizinan, kesesuaian kegiatan penambangan di lapangan dengan wilayah izin, serta pengelolaan dan kondisi lingkungan di sekitar lokasi tambang," jelasnya.

Lebih lanjut Sarudin menjelaskan bahwa pengawasan yang dilakukan saat ini bukan semata-mata untuk mencari pelanggaran, tetapi untuk memastikan seluruh kegiatan pertambangan berjalan tertib, sesuai ketentuan, memperhatikan keselamatan, serta tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan merugikan masyarakat.

"Setiap temuan di lapangan akan kami dokumentasikan dan verifikasi. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Serang dan dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi serta instansi yang berwenang," tegasnya.

Pemerintah Kabupaten Serang, sebut Sarudin, pada prinsipnya mendukung investasi dan kegiatan usaha pertambangan yang legal, tertib, bertanggung jawab terhadap lingkungan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Pertama, pihaknya meminta perusahaan memastikan seluruh kegiatan pertambangan dilaksanakan sesuai dengan

● (Egi)



Amdal Belum Beres, Gubernur Jabar Hentikan Proyek Data Center Jatiluhur

TANGSEL |
Harian Merdeka

Bogor | **Harian Merdeka** - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meluruskan polemik penghentian sementara proyek pembangunan AI Data Center BDX senilai Rp3,5 triliun di kawasan Jatiluhur.

Penghentian tersebut dipastikan bukan karena hambatan birokrasi di tingkat Pemkab Purwakarta maupun Pemprov Jabar, melainkan lambatnya konsultan dalam menyerahkan berkas perizinan.

Dedi menegaskan, pengerjaan proyek tidak boleh berjalan sebelum seluruh kriteria legalitas terpenuhi.

"Ketika saya tanya kemarin, IMB belum keluar, Amdalnya juga belum. Ya saya minta jangan dilaksanakan dulu. Kesalahannya bukan di Pemda, tapi konsultan yang belum memasukkan data sampai saya datang ke lokasi," ungkap Dedi Mulyadi dilansir dari Antara.

KDM menekankan bahwa

langkah penghentian yang dilakukannya sejak kunjungan mendadak pada Selasa (28/7) tersebut merupakan wujud konsistensi penegakan aturan demi melindungi kepentingan ekologi dan hak warga lokal atas pasokan air bersih.

Guna menjaga objektivitas kebijakan, Pemprov Jabar melibatkan akademisi dari Universitas Indonesia (UI) untuk memberikan kajian serta masukan independen terkait kelayakan dampak lingkungan proyek data center AI tersebut.

"Bagi saya pribadi, kalau secara objektif Amdal lulus, ya saya tidak ada masalah untuk dilaksanakan. Kalau menurut Amdalnya tidak boleh, ya saya tidak ada masalah juga dihentikan. Tapi satu catatan, warga Purwakarta yang berkorban untuk kepentingan Jatiluhur harus mendapat akses air. Tidak boleh terganggu," ujarnya.

Terkait kekhawatiran krisis air, KDM mengklarifikasi bahwa kapasitas pasokan air Waduk Jatiluhur sebenarnya sangat melimpah

dan secara teknis sanggup memenuhi kebutuhan operasional BDX tanpa mengganggu kuota masyarakat.

Ia merinci, PDAM Kabupaten Purwakarta memiliki jatah alokasi air resmi sebesar 3.000 liter per detik dari Waduk Jatiluhur, namun selama berpuluh-puluh tahun baru terserap sekitar 380 liter per detik atau setara 11 persen dari total jatah.

"Kalau dari jatah yang diberikan dari 100 persen baru dipakai 11 persen, berarti ada 89 persen air yang tidak dimanfaatkan oleh PDAM. Sekarang dipakai lagi sebanyak 14 persen oleh perusahaan. Masih kurang apa nyisa? Nyisa. Sederhana," ujar Dedi.

Adapun kunjungan mendadak Dedi ke lokasi pusat data AI tersebut bertujuan memastikan investasi raksasa bernilai triliunan rupiah itu berdiri di atas lahan yang terbebas dari ancaman bencana banjir, gempa bumi, serta erupsi gunung berapi, di samping memastikan kesiapan ketersediaan pasokan listrik dan air. ● (Egi)

Kecolongan Menu Berbelatung, KP MBG Tuntut Kepala SPPG Lebak Disanksi Tegas

LEBAK | **Harian Merdeka**

Niat mulia pemerintah menggenjot kualitas sumber daya manusia melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tercoreng oleh insiden memprihatinkan di Kabupaten Lebak, Banten. Kasus ditemukannya benda yang diduga belatung di dalam makanan siap santap di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al Hadid, Kampung Cijahi, Desa Curugbitung, pada Senin (28/9/2026) lalu, memicu kecaman luas dari berbagai elemen publik dan pegiat pengawasan kebijakan publik.

Berdasarkan penelusuran di lapangan, insiden bermula ketika sebagian siswa dilaporkan telah menyantap hidangan tersebut sebelum akhirnya pihak sekolah mendapati adanya kontaminasi mengkhawatirkan di dalam wadah penyajian (ompreng). Temuan ini langsung memantik alarm bahaya terkait standar keamanan pangan (food safety) yang dikhawatirkan luput dari pengawasan ketat.

Menanggapi insiden tersebut, Aang selaku Pengawas Ahli Gizi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Hamim Center Founder, tidak membatasi dan membenarkan bahwa pasokan makanan bermasalah itu bersumber dari dapur SPPG yang dikelolanya.

“Terkait temuan tersebut, betul berasal dari SPPG kami.



Video itu sudah kami luruskan bersama pihak sekolah, setelah tim dapur mendatangi lokasi,” ujar Aang, sebagaimana dikutip dari faktabanten.co.id.

Kendati pihak pengelola telah menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf, desakan pertanggungjawaban hukum dan administratif secara sistemik kini tidak dapat dihindarkan lagi.

Desakan Tegas: Periksa dari Hulu ke Hilir dan Sanksi Suspend

Menyikapi kelalaian fatal ini, Marulitua Rajagukguk, Ketua Tim Advokasi Komite Peman-tau Makan Bergizi Gratis (KP

MBG), melontarkan kritik tajam terhadap lemahnya rantai pengawasan pelaksanaan program strategis nasional tersebut. Ia menilai insiden ini bukan sekadar persoalan teknis di dapur, melainkan cerminan dari long-garnya fungsi kontrol kualitas secara menyeluruh.

“Untuk kasus MBG berbelatung ini, harus diperiksa semua dari hulu sampai hilir—mulai dari penyedia catering hingga Kepala SPPG yang tidak maksimal melakukan pemeriksaan. Harus ada sanksi tegas untuk Kepala SPPG supaya ke depan tidak terulang lagi. Dapur MBG-nya wajib dilakukan audit higi-

enitas, karena ini menyangkut gizi anak sebagai aset bangsa. Jika ada dugaan tindak pidana, aparat kepolisian harus mengusut tuntas,” tegas Marulitua Rajagukguk dalam keterangannya.

Tim Advokasi KP MBG menilai fungsi pengawasan dari Korwil Badan Gizi Nasional (BGN) serta Kepala SPPG Lebak telah kecolongan. Sangat ironis jika kasus serius yang menyangkut kesehatan anak-anak sekolah ini hanya berhenti pada dialog atau evaluasi internal tanpa adanya sanksi penindakan yang berefek jera.

● (Egi)

PENGAMAT: BINTANG MAHAPUTERA

Pengamat kebijakan publik Adib Miftahul mengatakan, pemberian tanda kehormatan kepada Panglima TNI tersebut menarik dicermati, terlebih sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah melakukan pergantian Kapolri.

“Saya melihat akan ada pergantian Panglima TNI,” ujar Adib kepada Harian Merdeka, Senin (5/10).

Menurut Adib, pergantian Kapolri beberapa hari lalu juga dapat menjadi salah satu indikasi Presiden tengah melakukan penataan di jajaran pimpinan aparat keamanan.

“Dengan pergantian Kapolri

beberapa hari lalu, itu juga sinyal Presiden akan mengganti Panglima TNI,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Mahaputera kepada sejumlah tokoh dan pejabat tinggi negara dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI di Lapangan Prima, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Senin (5/10/2026).

Penganugerahan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 87/TK Tahun 2026. Presiden Prabowo secara langsung menyematkan lencana dan selem-

pang tanda kehormatan kepada para penerima.

Bintang Mahaputera Adipurna diberikan kepada tiga tokoh, yakni Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, Menteri Pertahanan Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin, serta Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.

Sementara itu, Bintang Mahaputera Adipradana diberikan kepada Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi, KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali, dan KSAU Marsekal TNI M. Tonny Harjono.

Penganugerahan tanda kehormatan tersebut merupakan bentuk penghargaan negara atas jasa, pengabdian, dan kontribusi para penerima terhadap bangsa dan negara.

Di tengah adanya perubahan pada jajaran pimpinan aparat keamanan, pemberian penghargaan kepada Panglima TNI juga menjadi perhatian dan memunculkan spekulasi mengenai kemungkinan perubahan kepemimpinan di tubuh TNI.

Namun, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Presiden maupun pemerintah mengenai rencana pergantian Panglima TNI. ● (Egi)

INDONESIA vs THAILAND DI FINAL FIFA ASEAN

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (5/10).

Tim Garuda melaju ke partai puncak setelah menjadi juara Grup A.

Indonesia mengoleksi tujuh poin, sama dengan Malaysia yang menempati posisi kedua. Kedua tim juga memiliki rekor head to head yang sama kuat setelah bermainimbang 0-0.

Penentuan juara Grup A akhirnya ditentukan melalui produktivitas gol karena selisih gol Indonesia dan Malaysia sama-sama surplus sembilan gol. Indonesia berhak menjadi juara grup setelah mencetak 11 gol, sedangkan Malaysia hanya mengoleksi sembilan gol.

Sementara itu, Thailand melaju ke final dengan status juara Grup B. Gajah Perang mengumpulkan enam poin, sama dengan Vietnam. Thailand berhak menempati posisi teratas karena unggul head to head setelah mengalahkan Vietnam dengan skor 2-0.

Final Indonesia kontra Thailand

ADU TAKTIK PELATIH

juga menjadi pertarungan menarik dari sisi strategi. Pelatih Indonesia John Herdman akan beradu taktik dengan juru racik Thailand, Anthony Hudson. Kedua

pelatih

sama-sama berasal dari Inggris dan memiliki pengalaman berkarier di sepak bola Amerika Utara.

Herdman pernah menangani Timnas Kanada serta klub Major League Soccer (MLS), Toronto FC. Sementara Hudson pernah melatih Colorado Rapids di MLS

serta menjadi asisten pelatih dan caretaker Timnas Amerika Serikat.

Herdman juga sudah mengenal Hudson ketika keduanya berkiprah di Amerika Utara. Saat menangani Kanada, Herdman tiga kali berhadapan dengan Hudson yang ketika itu menjadi bagian dari staf pelatih Amerika Serikat. Dari tiga pertemuan tersebut,

Herdman meraih satu kemenangan, satu hasil imbang dan satu kekalahan.

Meski demikian, Herdman menilai Hudson merupakan pelatih yang memiliki kemampuan beradaptasi dengan baik dan mempunyai banyak variasi dalam menerapkan strategi.

● (hmi)



terbit setiap sore Senin s/d Sabtu

HARIAN **MERDEKA**

aspirasi rakyat

Langganan ePaper...

Dapatkan berita terkini setiap sore langsung di perangkatmu.

Hanya **Rp50.000/bulan** Hubungin **Alan Oskar : +62 895-2285-1963**

